



BAPPENAS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



MODUL II PARADIPLOMASI: MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM INVESTASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Disediakan sebagai outcome dari Hibah Kedaireka 2023

**BAPPENAS - BINA NUSANTARA - DIKTI
DESEMBER 2023**

TIM PENYUSUN

Penulis:

- ❖ Dr. Lili Yulyadi Arnakim .IRK., B.HSc., M.HSc.
- ❖ Dr. Roseno Aji Affandi
- ❖ Miranda Tahalelel Ph.D
- ❖ Agustin Arry Yanna, SS, MA
- ❖ Moch Faisal Karim Ph.D
- ❖ Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama Ph.D
- ❖ Yulia Agnis Sutarno
- ❖ Rahmat Hidayat

Kontributor:

- ❖ Amelia Ari Putri
- ❖ Nur Komariah
- ❖ Adrian
- ❖ Benedictus N Davin
- ❖ Delviana Pratama
- ❖ Ichelle Aprilia
- ❖ Putrinda Tawainella
- ❖ Salsa Nabila Putri
- ❖ M.Reza Saputra

Disusun oleh BINUS dan BAPPENAS melalui pendanaan dari Kedaireka RISTEK DIKTI

DAFTAR ISI

Abbreviation	v
Kata Pengantar	vi
Pendahuluan	1
Objektif	3
Sesi Pelatihan	4
Tema Sub Modul	4
Framework dan tools yang digunakan	4
Cara Penyampaian (Delivery)	4
Rujukan Utama	5
Matrix Kurikulum Modul	6
SUB MODUL:	
a) SUB MODUL 1: Investasi dan Perdagangan internasional	7
b) SUB MODUL 2: Identifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah	15
c) SUB MODUL 3: Meet dan Match dengan potensial penanam modal asing	29
d) SUB MODUL 4: Negosiasi bisnis internasional di daerah	37
e) SUB MODUL 5: Perencanaan dan Pelaksanaan investasi di daerah dan perdagangan internasional	42
Referensi	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Geographical distribution on RTAs, both in force and under negotiations (Ravenhill, 2017)	13
Gambar 2.1. Penyerapan Tenaga Kerja dari PMA dan PMDN (Desember 2019 - Desember 2022) Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023	18
Gambar 2.2. Analisis Sempel SWOT Sumber: Diolah oleh penulis, 2023	20
Gambar 3.1. Teori Bargaining and Cooperation	32
Gambar 3.2. Nilai-nilai dalam GPN	33
Gambar 3.3. Level-level dalam Politik Ekonomi Internasional.....	35
Gambar 4.1. Teori Sistem Dunia	41

ABBREVIATION

AFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
CEFTA	: Central European Trade Agreement
FGD	: Focused Group Discussion
GCC	: Global Commodity Chain
GPN	: Global Production Network
IMF	: International Monetary Fund
LN	: Luar Negeri
OECD	: Organization for Economic Cooperation and Development
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Pemprov	: Pemerintahan Provinsi
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunity, Threat
WTO	: World Trade Organization

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada tuhan yang maha esa. Atas rahmatNya kami bisa menyelesaikan draft modul paradiplomasi kedua: Meningkatkan Peran Internasional Pemda (pemerintahan Daerah). Modul kedua ini adalah hasil penelitian yang dibiayai oleh projek Kedaireka Dikti bekerjasama dengan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas. Selain itu, modul ini juga sebagai langkah menindaklanjuti policy recommendation yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh staf pengajar dan civitas akademika (dosen) dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara (BINUS).

Kami melakukan penelitian mendalam tentang peran Pemda dan proses internasionalisasi, yang kami sebut sebagai "model paradiplomasi", dan inovasi yang kami tawarkan adalah pemberdayaan Sumber daya Manusia atau modal insan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah di tingkat internasional dengan menjalankan kerjasama dengan pemerintahan daerah di negara lain seperti kerjasama Sister city. Jurusan Hubungan Internasional Universitas Bina Nusantara bekerja sama dengan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas mengharapkan adanya program yang bisa meningkatkan peran pemda dalam kerjasama internasional. Diharapkan pemerintah daerah, khususnya bagian kerja sama internasional dan Bappeda, akan terlibat secara aktif dalam kegiatan ini sebagai bagian dari tugas dan fungsi lembaga. Salah satu follow up ini adalah melaksanakan pelatihan fokus pada peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan paradiplomasi yang diharapkan bisa dieksekusi di tingkat pemerintahan daerah di provinsi wilayah Indonesia. Tujuan dari modul ini adalah

untuk berbagi pengalaman dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kerja sama internasional, terutama dalam bidang investasi dan perdagangan internasional dengan dengan organisasi internasional atau perusahaan multinasional. Selain itu, Modul pelatihan ini juga juga akan mengidentifikasi potensi, tantangan investasi asing dan perdagangan internasional. Modul hasil dari beberapa kegiatan seperti Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan bersama sama dengan Bappenas di Batam, Bali dan di Aceh.

PENDAHULUAN

Di era desentralisasi, peran internasional pemerintah daerah (pemda) menjadi penting untuk memajukan daya saing di daerah melalui upaya memperluas peluang investasi, mengembangkan pasar internasional, serta turut aktif dalam jejaring internasional. Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No 3/2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemda. Nilai tambah dari kerjasama internasional bagi pemerintah daerah adalah memperkuat kebijakan publik yang lebih efisien dan pengembangan program-program yang lebih inovatif. Hal ini dapat dicapai dengan memobilisasi sumber daya teknis, keuangan dan politik, berbagi pengetahuan yang diperoleh dari kota lain, dan memperkuat kemampuan teknis dan politik pegawai negeri melalui berbagi pengalaman dengan aktor eksternal, termasuk aktor internasional yang beroperasi di Indonesia.

Dengan menyadari masih terbatas model, aturan serta, SOP dan instrumen untuk meningkatkan investasi asing dan perdagangan internasional di daerah yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Selain itu, tidak ada alat ukur terstandar untuk melakukan evaluasi dan monitoring terkait peran internasional pemda. Pemerintah Pusat hanya memiliki instrumen dalam mengukur tingkat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi-inovasi di level domestik melalui penghargaan pembangunan daerah (PPD) yang dilakukan tiap tahun. Maka kami merasa dengan menyediakan modul ini, kami bisa meningkatkan kemampuan Pemda dalam meningkatkan investasi asing dan mengembangkan perdagangan internasional untuk produk daerah. Semoga dengan adanya modul ini bisa membuat semua pemerintah daerah mampu mengembangkan fungsi dan peran internasional untuk mengembangkan potensi daerahnya.

Dengan rangkaian FGD dan Workshop yang telah diselenggarakan bersama-sama antara Bappenas dan Universitas Bina Nusantara dengan dukungan Program Kedaireka DIKTI, telah menjadi sumber utama untuk pengembangan modul paradiplomasi kedua untuk pemda di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sudah direncanakan untuk membuat model pengembangan kerjasama internasional bagi daerah serta instrumen penilaian akan kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Model kerjasama ini menekankan kepada strategi paradiplomasi yang sudah dikembangkan sebelumnya dan telah diterapkan di dalam skala yang terbatas sebelumnya. Model prototype dan konsep paradiplomasi/peran internasional daerah yang pernah disusun oleh BINUS, diharapkan dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan kebijakan terkait peran internasional pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Model ini dikembangkan selama kurang lebih empat tahun dan prototipe-nya sudah diujicobakan secara terbatas dalam pengembangan peran internasional pemda untuk memajukan internasionalisasi sektor pariwisata. Model paradiplomasi ini adalah *poliheuristic* model yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dimensi, aktor, metode dalam proses pelaksanaan peran internasional tersebut. Model ini menitikberatkan kepada penguatan interaksi informalitas sebagai modalitas bagi pemerintah daerah melakukan kerjasama internasional. Model ini akan kami kembangkan sebagai alat, tidak hanya untuk mengukur kelemahan dan kekuatan setiap masing-masing pemda dalam melakukan kerjasama internasional namun juga untuk pembuatan strategi peningkatan peran internasional pemda.

Inovasi yang kami tawarkan adalah bagian dari riset panjang kami tentang peran pemda dan proses internasionalisasi, yang kreasi reka yang kami sebut “model paradiplomasi. Pelaksanaan pelatihan terkait paradiplomasi bagi pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia adalah untuk berbagi praktik baik

pemerintah daerah dalam pengembangan kerjasama internasional baik secara umum, dalam sektor investasi unggulan seperti pariwisata dan perdagangan, serta yang mempunyai bentuk kerjasama dengan lembaga internasional atau perusahaan multinasional yang beroperasi di daerahnya. Pemilihan peserta mengacu pada kemungkinan atau perencanaan serta potensi daerah terkait dari salah satu komponen dari kerjasama internasional. Adapun modul kedua ini terdiri dari 5 sub modul yang memberikan pelatihan fokus kepada berikut ini. Investasi dan Perdagangan internasional; Identifikasi kekuatan dan daya Tarik Daerah; Identifikasi potensial penanam modal, Negosiasi business internasional; Rencana dan monitoring investasi dan perdagangan internasional

Objektif

Objektif dari modul terdiri beberapa tujuan. Di antaranya:

1. Untuk menjelaskan kepada peserta tentang konsep Investasi dan Perdagangan internasional
2. Untuk memberikan kemampuan kepada para peserta untuk mengidentifikasi kekuatan dan daya Tarik Daerah
3. Memahami dan mampu mengidentifikasi potensial penanam modal asing di daerah
4. Memberikan wawasan dan kemampuan kepada peserta dalam melaksanakan Negosiasi bisnis internasional daerah
5. Mampu merencanakan dan melakukan kerjasama dengan para potensial investor asing dan meningkatkan perdagangan internasional.

Sesi Pelatihan

Setiap sub-modul akan disampaikan dan didiskusikan dengan peserta selama 90 menit. Keseluruhan durasi pelatihan untuk modul ini adalah 450 menit (7 jam 30 menit atau full day)

Tema Sub Modul

Tema yang diangkat dalam sub-modul adalah:

- Investasi dan Perdagangan internasional
- Identifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah
- Meet dan Match dengan potensial penanaman modal asing
- Negosiasi bisnis internasional daerah
- Perencanaan dan Pelaksanaan investasi di daerah dan perdagangan internasional

Framework dan tools yang digunakan

Adapun framework dan tools yang digunakan melaksanakan pelatihan ini adalah buku dan artikel yang menjelaskan tentang investasi asing atau penanam modal asing di Indonesia seperti panduan Penanaman modal asing di Indonesia, dan aturan aturan perdagangan internasional yang berlaku.

Cara Penyampaian (Delivery)

Cara penyampaian atau delivery system yang akan dipakai dalam menyampaikan materi ini adalah melalui berbagai cara seperti ceramah, diskusi, presentasi, brainstorming dan tanya jawab yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta dan sekaligus melihat respon partisipan.

Rujukan Utama

1. Panduan dan aturan Penanaman modal Asing (BKPM).
2. Aturan yang dipakai oleh WTO
3. Blueprint dan roadmap ASEAN Economic Community.

Matrix Kurikulum Modul



Modul II

Paradiplomasi: Meningkatkan Investasi dan Perdagangan Luar Negeri

Modul	# Session (90 minutes)	Syllabus/ Learning Objective	Sub Modul	Tools/ Framework Used	Delivery
Paradiplomasi: Meningkatkan Investasi dan Perdagangan luar negeri	5	<p>Mampu memahami Konsep Investasi dan Perdagangan international</p> <p>Mampu mengidentifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah</p> <p>Mampu melakukan Meet dan Match dengan potensial penanam modal asing</p> <p>Mampu menerapkan negosiasi business internasional daerah</p> <p>Mampu melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan investasi di daerah dan perdagangan internasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi dan Perdagangan international 2. Identifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah 3. Meet dan Match dengan potensial penanam modal asing 4. Negosiasi business internasional daerah 5. Perencanaan dan Pelaksanaan investasi di daerah dan perdagangan internasional 	<p>Panduan Penanaman Modal Asing di Indonesia (BKPM)</p> <p>Aturan Menteri dan Aturan Internasional (WTO)</p>	<p>Lecture</p> <p>Exercise</p> <p>Games</p> <p>Discussion</p>

SUB MODUL 1: Investasi dan Perdagangan internasional

Deskripsi:

Tujuan: Peserta memahami konsep dan model pengembangan investasi dan perdagangan internasional

Waktu: 90 menit

Media/alat bantu: Flip Chart, Kertas plano

Metode: Diskusi, Curah Pendapat

Proses:

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan pemahaman mereka mengenai investasi dan perdagangan internasional dan model dari investasi dan perdagangan internasional dalam kertas plano.
2. Fasilitator mereview dan mengkategorikan konsep dan model tentang investasi dan perdagangan internasional yang dituliskan
3. Fasilitator memasukkan hasil diskusi tentang definisi dan model dalam matrix dan memberikan penjelasan tambahan terkait kedua hal tersebut.
4. Peserta berdiskusi lebih lanjut dan fasilitator menegaskan lebih lanjut mengenai kerangka pengembangan investasi dan perdagangan internasional yang bisa dikembangkan daerah.

Materi

Investasi dan perdagangan dalam lingkup Internasional menjadi suatu topik favorite dalam perekonomian negara negara yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dampak serta keuntungan yang besar yang mampu dihasilkan

melalui kegiatan investasi dan perdagangan bagi perekonomian suatu negara. Secara ringkas, 'Investasi' merupakan penanaman modal oleh satu pihak ke pihak lain dengan tujuan tertentu. Sedangkan 'perdagangan' dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Investasi dan perdagangan menjadi suatu hal yang penting dalam upaya peningkatan perekonomian. Investasi Internasional saat ini menjadi salah satu upaya yang tengah diusahakan oleh berbagai negara untuk dapat meningkatkan pendapatan mereka. Investasi internasional merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau negara ke negara diluar negara investor (Chen, 2022). Investasi internasional dalam hubungan antar negara dapat terjadi melalui *Foreign Direct Investment* (FDI). FDI merupakan suatu investasi jangka panjang yang dapat dilakukan melalui investasi fisik yang kerap dilakukan oleh *Multinational Corporations* (MNC) melalui pembangunan kantor cabang atau pembangunan pabrik di suatu negara tertentu. Investasi yang dilakukan dalam hal ini termasuk dengan teknologi, keterampilan manajemen, pemasaran produk, dan lain lain yang mampu membantu proses pembangunan ekonomi (Agostin & Machado, 2005).

Di Indonesia FDI telah banyak dilakukan oleh perusahaan perusahaan asing melalui pembangunan pabrik ataupun kantor cabang dari perusahaan asing tersebut. Penanaman modal atau investasi yang dilakukan oleh MNC ke negara lain dilakukan guna mencapai tujuan serta mendapatkan keuntungan bagi seluruh pihak. Bagi perusahaan asing, FDI dilakukan dengan maksud:

1. *Market Seeker*: MNC melakukan penanaman modal di negara lain guna mendapatkan pasar yang besar di luar dari negara asalnya.

2. *Resources Seeker*: melakukan investasi untuk mendapatkan bahan baku dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
3. *Efficiency Seeker*: Melakukan investasi untuk mendapatkan wilayah yang efisien seperti pembangunan pabrik yang lebih murah dan yang lainnya.
4. *Strategic Partnership Seeker*: Melakukan investasi guna dapat melakukan partnership dengan melakukan merger atau akuisisi sehingga mampu menaikkan nilai yang dimiliki oleh perusahaan.

Sedangkan untuk negara yang mendapatkan investasi (*host country*) investasi mampu memberikan manfaat atau dampak yang baik bagi perekonomian negara tersebut adalah peningkatan pajak, stimulasi ekonomi, pengembangan SDM, peningkatan lapangan kerja, serta mendapatkan akses pada keahlian, keterampilan, dan teknologi yang dimiliki oleh pelaku investasi tersebut (Team, 2023). Melalui hal tersebut, investasi mampu menjadi salah satu pendapatan negara yang dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara.

Selain investasi, perdagangan internasional juga menjadi salah satu aktivitas yang mampu membawa dampak yang baik bagi perekonomian negara. Perdagangan Internasional merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang melibatkan pertukaran barang atau jasa, dalam hal ini pertukaran tersebut dalam dilakukan melalui aktivitas ekspor impor (Team, 2023). Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh negara negara guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan terkait disebutkan bergantung pada empat struktur utama yang meliputi keamanan, produksi, keuangan, serta pengetahuan (Strange, 1994)

- A. Keamanan:** Hubungan Perdagangan Internasional yang dilakukan antar negara tentunya melibatkan faktor keamanan yang menjelaskan bagaimana aliansi atau konflik yang ada mampu mempengaruhi hubungan mitra dagang antar negara.
- B. Produksi:** Struktur produksi mengatur apa yang harus diproduksi, oleh siapa, untuk siapa, apa yang digunakan, dan dalam kondisi apa produksi dilakukan. Struktur produksi juga mengatur bagaimana karyawan diatur dan apa yang akan mereka hasilkan dalam produksi sehingga diharapkan menghasilkan kekayaan atau keuntungan.
- C. Keuangan:** Dalam lingkup perdagangan, dampak dari struktur keuangan sudah tidak lagi menjadi hal yang utama dikarenakan adanya sosialisasi dalam bidang perdagangan. Hasil dari kinerja perdagangan yang buruk disebutkan disebabkan oleh adanya nilai tukar yang didorong lebih tinggi oleh masuknya modal asing. Dan sebaliknya, melemahnya nilai pasar pada salah satu sektor perekonomian dunia mampu menyebabkan neraca perdagangan suatu negara memburuk.
- D. Pengetahuan:** Struktur pengetahuan menjadi salah satu struktur yang tidak kalah penting dalam perdagangan. Dalam hal ini, peran struktur pengetahuan adalah menentukan pengetahuan dan bagaimana pengelolaannya. Struktur ini semakin terlihat dengan adanya percepatan kemajuan teknologi yang ada dalam perdagangan dunia. Selain itu, terdapat juga korelasi yang kuat antara ketersediaan pengetahuan yang baik dengan kinerja perdagangan.

Strange (1994) menuliskan bahwa akibat dari adanya ketergantungan terhadap keempat struktur diatas adalah pertukaran yang terjadi dalam perdagangan internasional tidak hanya sekedar hasil dari kekuatan pasar yang ada, melainkan merupakan juga hasil dari penawaran serta permintaan yang relatif. Serta diungkapkan juga mengenai bagaimana hal tersebut merupakan hasil dari kegiatan tawar menawar yang kompleks yang berkaitan dengan ekonomi dan politik (Strange, 1994). Perdagangan Internasional dinilai mampu membawa dampak yang baik bagi pertumbuhan dan juga perkembangan suatu negara (Rose, 2005). Meskipun demikian, dalam melakukan Perdagangan Internasional, terdapat hambatan atau batasan yang dialami oleh negara negara terkait. Hal ini menjadi salah satu faktor pembentukan organisasi perdagangan internasional guna mempermudah proses perdagangan yang dijalin antar negara sebagai bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Kerjasama yang terjalin antar negara dalam perekonomian ini juga dapat terjalin secara bilateral dan multilateral (Rose, 2005). Dalam sektor perdagangan, terdapat tiga organisasi internasional yang terkemuka yaitu:

A. World Trade Organization (WTO)

WTO yang sebelumnya adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) merupakan suatu organisasi internasional bidang perdagangan yang berwenang atas aturan perdagangan yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk membantu atau memperlancar berjalannya usaha yang dilakukan oleh pelaku produsen barang dan jasa, eksportir, serta importir dalam lingkup perdagangan internasional. Melalui organisasi ini, negara negara anggota juga dapat menegosiasikan perjanjian atau aturan perdagangan. WTO juga menjadi sarana dalam penyelesaian konflik atau perselisihan dagang yang dihadapi oleh negara anggota (WTO, 2023).

B. International Monetary Fund (IMF)

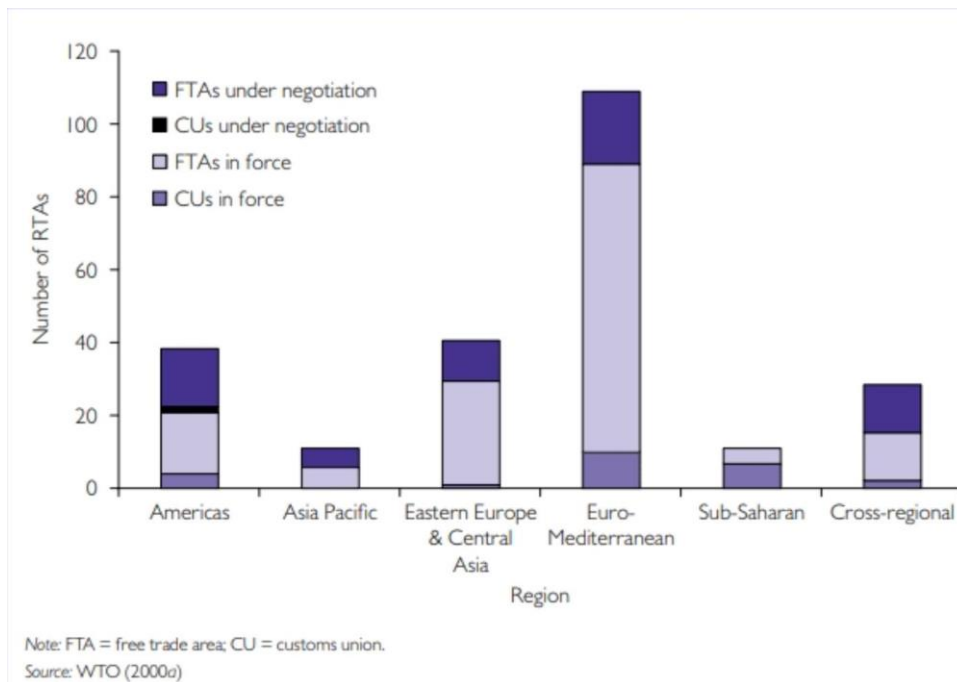
IMF merupakan organisasi internasional yang memiliki upaya untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta mampu membawa kesejahteraan untuk negara negara anggotanya (IMF, 2023). IMF menjadi organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi yang mendorong stabilitas keuangan serta kerjasama moneter yang dilakukan oleh negara anggotanya guna menghasilkan produktivitas yang tinggi (IMF, 2023). Dalam lingkup perdagangan, IMF memiliki tujuan untuk memfasilitasi setiap perluasan serta keseimbangan pertumbuhan pada perdagangan internasional (Rose, 2005).

C. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

OECD menjadi organisasi internasional yang memiliki upaya untuk mampu membentuk kebijakan guna menghadapi kehidupan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan bersama. Dalam lingkup perdagangan OECD dinilai memiliki beberapa instrumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan liberalisasi perdagangan. Meskipun demikian, OECD menjadi lembaga yang tidak memiliki sanksi atau imbalan tertentu yang mampu digunakan sebagai pendorong liberalisasi perdagangan.

Selain ketiga organisasi internasional tersebut, kerjasama bilateral atau regional dalam bidang perdagangan juga dilakukan oleh negara negara yang ada di dunia guna mencapai tujuan tertentu seperti AFTA (*Asean Free Trade Agreement*), APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*), APTA (*Asia-Pacific Trade Agreement*), CEFTA (*Central European Free Trade Agreement*), NAFTA (*North*

American Free Trade Agreement) dan berbagai perjanjian kerjasama perdagangan lainnya (Ravenhill, 2017).



Gambar 1.1: Geographical distribution on RTAs, both in force and under negotiations (Ravenhill, 2017)

Perdagangan Internasional menjadi salah satu yang dibutuhkan oleh negara guna meningkatkan pendapatan negara dan pemenuhan kebutuhan negara. Hal ini karena adanya kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh setiap negara membuat diperlukan adanya perdagangan antar negara untuk memenuhi kebutuhan negara terkait. Perdagangan internasional dikatakan mampu berjalan dengan baik dan memberikan perubahan bagi pertumbuhan ekonomi apabila dilakukan sesuai dengan kebijakan dan infrastruktur yang akomodatif (Vijayasri, 2013).

Investasi dan juga perdagangan internasional merupakan aspek penting dalam sektor perekonomian yang perlu dilakukan oleh suatu negara. Hal ini dikarenakan investasi asing mampu membawa perubahan yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara tersebut, maupun juga di daerah. Namun, beberapa aspek juga perlu mendapatkan perhatian seperti kesiapan pemerintah daerah dalam menerima investasi asing yang masuk di daerahnya. Melalui peningkatan investasi dan kerjasama ekonomi, hal ini juga dapat mendorong dan mengembangkan potensi besar lainnya bagi sektor sektor selain ekonomi atau terdapat *spill-over effect* atau dampak yang menyebar dari investasi yang berkembang di daerah.

SUB MODUL 2: Identifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah

Deskripsi: Pada sub-modul ini, peserta akan mempelajari tentang proses identifikasi kekuatan dan daya tarik sebuah daerah. Kekuatan dan daya tarik ini dapat menjadi landasan strategis untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sebuah daerah. Peserta akan memahami pentingnya mengenali aspek-aspek positif yang dimiliki oleh sebuah daerah, serta bagaimana menggali potensi daerah untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan.

Tujuan: Peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dan daya tarik daerah yang dapat dikerjasamakan secara internasional dan perlu dikembangkan lebih lanjut dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Melalui pemahaman ini, diharapkan peserta mampu mengaplikasikan metode identifikasi yang efektif untuk menggali potensi dan peluang yang dimiliki sebuah daerah, sekaligus menghadapi tantangan yang mungkin timbul.

Tujuan khususnya melibatkan:

1. Memahami konsep dasar kekuatan dan daya tarik daerah.
2. Menguasai metode identifikasi, terutama analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, and thread*), melalui survei partisipatif, dan analisis data sekunder.
3. Mengaplikasikan pemahaman melalui studi kasus untuk mengevaluasi keberhasilan identifikasi kekuatan dan daya tarik di berbagai konteks.
4. Mengintegrasikan hasil identifikasi dalam perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan mencapai tujuan ini, diharapkan peserta dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam mendukung pembangunan daerahnya dengan memaksimalkan potensi lokal dan meminimalkan risiko yang ada. Sub Modul ini

juga diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa pengembangan daerah yang berkelanjutan tidak hanya melibatkan faktor ekonomi saja, tetapi ada juga unsur-unsur sosial, budaya, dan lingkungan.

Waktu: 90 menit

Media/alat bantu: Flip Chart, Kertas plano

Metode: Diskusi, Curah Pendapat

Proses:

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan apa saja kekuatan dan daya tarik daerah yang mempunyai potensi untuk dikerjasamakan.
2. Fasilitator mengkategorikan jawaban dalam beberapa tentang investasi dan perdagangan internasional yang dituliskan
3. Fasilitator mempertajam diskusi dengan memberikan materi terkait potensi yang bisa dikembangkan daerah terutama melalui kerjasama internasional.
4. Diskusi antara peserta dan fasilitator lebih lanjut.

Materi

1. Pengenalan Identifikasi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah

1.1 Definisi Kekuatan dan Daya Tarik Daerah

Secara sederhana definisi kekuatan daerah merujuk pada aspek-aspek positif yang dimiliki oleh suatu wilayah, yang dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan pertumbuhan (Grant, 1991). Hal ini mencakup sumber daya alam, infrastruktur, sumber daya manusia, dan aspek lain yang memberikan keunggulan komparatif terhadap wilayah lainnya. Daya tarik daerah mencakup faktor-faktor yang membuat suatu wilayah menarik bagi penduduk lokal maupun

pengunjung dari luar. Ini dapat melibatkan keindahan alam, keberagaman budaya, peluang ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memberikan nilai tambah dan daya tarik khusus.

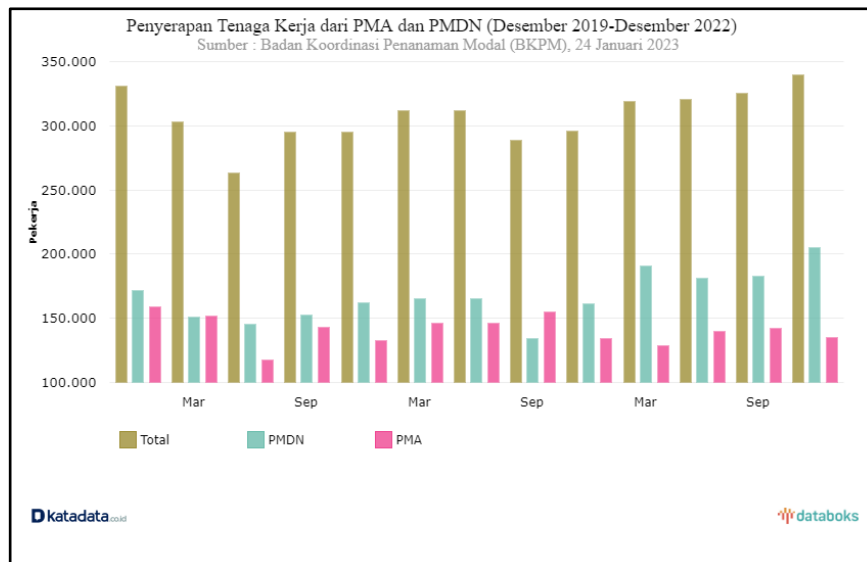
Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan yang dapat dikerjasamakan dalam konteks internasional. Ada yang memiliki keunggulan secara geografis letak wilayah yang berdekatan dengan negara lain, ada yang sudah unggul secara infrastruktur dasar, ada yang unggul dari sumber daya alam, dan lain sebagainya. Akan tetapi problem dari sebagian besar wilayah/daerah di Indonesia adalah masalah kemampuan/kompetensi aktor/stakeholder yang menjalankan kerjasama internasional. Misalnya kemampuan manajemen dan komunikasi yang masih menggunakan pendekatan tradisional, misalnya hanya menjalankan kerjasama internasional melalui instruksi dari pemerintah pusat. Seharusnya dengan adanya UU Otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengembangkan wilayahnya untuk menjadi target dari FDI, apakah itu dengan pendekatan informal atau formal. Diperlukan bagi pemerintah daerah untuk membuat sebuah “*grand design*” dalam upaya internasionalisasi daerahnya.

Keberhasilan menarik investasi terletak pada kemampuan tata kelola yang baik, terwujud dalam perencanaan dan penganggaran yang terfokus (*money follow program*), sistem pelayanan yang terampil, transparan, dan cepat sesuai dengan kebutuhan publik dan mendukung kebijakan daerah yang berkualitas (Katadata, 2020). Kapasitas dan integritas kepemimpinan daerah yang kuat dapat menentukan terwujudnya tata kelola yang baik.

1.2 Peran penting identifikasi kekuatan dan daya tarik dalam perencanaan pembangunan

Proses identifikasi kekuatan dan daya tarik daerah memiliki peran sentral dalam perencanaan pembangunan. Dengan mengetahui kelebihan dan keunggulan suatu wilayah, pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menarik investasi, serta membangun citra positif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya proses identifikasi ini adalah supaya realisasi investasi diikuti juga dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Data pada gambar berikut merupakan salah satu contoh bagaimana perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dengan investasi masuk di Indonesia.



Gambar 2.I. Penyerapan Tenaga Kerja dari PMA dan PMDN (Desember 2019 - Desember 2022)

Sumber: databoks.katadata.co.id, 2023

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada kuartal IV 2022 mencapai Rp 314,8 triliun. Berdasarkan catatan, nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 175,2 triliun rupiah atau menyumbang 55,6% dari total realisasi investasi, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 43,3% (*year-on-year*). Berdasarkan laporan BKPM, serapan tenaga kerja dari PMA hanya sebanyak 134.952 orang atau 39,70% dari total serapan kerja investasi pada kuartal IV-2022. Jumlah ini menurun 5,25% dari kuartal sebelumnya (*quarter-to-quarter/qtq*), namun tumbuh tipis 0,62% dari tahun sebelumnya (*yoy*). Data diatas menunjukkan bagaimana melonjaknya nilai investasi asing pada kuartal IV-2022 tersebut, namun tak sebanding dengan serapan tenaga kerjanya. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunannya, terutama bagaimana meningkatkan kualitas dari SDM daerah.

2. Metode Identifikasi Kekuatan Daerah

2.1 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT merupakan alat manajemen strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek, organisasi, atau dalam konteks ini, pengembangan daerah. Dengan memahami kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*), kita dapat merancang strategi yang lebih efektif. Berikut adalah contoh sederhana analisis SWOT dalam mengidentifikasi kekuatan dan daya tarik daerah.



Gambar 2.2: Analisis Sempel SWOT

Sumber: Diolah oleh penulis, 2023

Proses identifikasi menggunakan metode ini sangat relevan untuk mengetahui apa saja potensi yang dimiliki daerah yang dapat dikembangkan dan bagaimana cara menutupi kelemahan dari daerah dalam rangka mendapat lirikan dari investor.

2.2 Pendekatan analisis eksternal dan internal

Dalam proses identifikasi kekuatan daerah, terdapat dua identifikasi untuk menganalisa situasi eksternal dan internal, dengan berbagai model dan pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat secara spesifik peristiwa atau isu yang perlu dianalisis. Proses analisa ini menjadi kritis untuk memahami dinamika

dan posisi suatu daerah. Pendekatan ini membantu menggali faktor-faktor yang berasal dari luar dan dalam wilayah tersebut yang dapat mempengaruhi pengembangan.

a. Analisis Eksternal

- **Pendekatan PESTEL:**

Menilai faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi wilayah. Contoh: perubahan kebijakan pemerintah, tren ekonomi global, atau perkembangan teknologi baru.

- **Analisis Porter's Five Forces:**

Menilai tingkat persaingan industri di wilayah dan dampaknya terhadap pengembangan. Contoh: kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok, atau ancaman produk pengganti.

- **Analisis Tren Pesaing:**

Menganalisis strategi dan keberhasilan wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa. Contoh: Mengidentifikasi wilayah tetangga yang berhasil dalam sektor pariwisata misalnya.

b. Analisis Internal

- **Pendekatan Value Chain:**

Menilai proses internal yang menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Contoh: Proses produksi, distribusi, dan pemasaran yang efisien.

- **Analisis Sumber Daya dan Kemampuan (*Resource-Based View*):**

Menganalisis sumber daya dan kemampuan unik yang dimiliki oleh wilayah. Contoh: Ketersediaan sumber daya alam, dan keahlian khusus masyarakat.

- **Analisis Kualitas Infrastruktur:**

Menilai kualitas infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi.

Contoh: Jaringan transportasi, teknologi informasi, dan utilitas.

3. Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Daerah

Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penentu daya tarik daerah membantu dalam merancang strategi pengembangan berkelanjutan yang dapat meningkatkan daya tarik wilayah secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa faktor yang menentukan daya tarik sebuah daerah.

3.1 Keindahan Alam dan Lingkungan

a. Potensi Wisata Alam

Identifikasi dan promosi keunikan dan keindahan alam wilayah, seperti pegunungan, pantai, dan taman nasional. Contoh: keberadaan danau yang indah, gunung yang menjulang, dan pantai berpasir putih.

b. Pelestarian Lingkungan

Upaya pelestarian alam dan ekosistem untuk mempertahankan keindahan alam jangka panjang. Contoh: program reboisasi, atau pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

3.2 Infrastruktur dan Aksesibilitas

a. Transportasi yang Efisien

Penyediaan sarana transportasi yang efisien dan terkoneksi dengan wilayah lain. Contoh: jaringan jalan raya yang baik, atau pelabuhan yang ramah pengguna.

b. Teknologi dan Konektivitas

Fasilitas teknologi modern dan konektivitas internet yang kuat. Contoh: Wifi gratis di area publik, dan inisiatif *smart city*.

c. Fasilitas Umum

Ketersediaan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan area rekreasi. Contoh: Pembangunan pusat perbelanjaan modern, atau revitalisasi pusat kesehatan.

3.3 Keberagaman Budaya dan Sejarah

a. Warisan Budaya

Identifikasi, pelestarian, dan promosi warisan budaya dan sejarah wilayah. Contoh: museum, situs bersejarah, atau festival budaya.

b. Keanekaragaman Tradisi dan Kuliner

Mempromosikan tradisi lokal, seni pertunjukan, dan kekayaan kuliner. Contoh: festival budaya tahunan, atau promosi makanan lokal.

c. Kerjasama Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Contoh: program pelatihan budaya, atau pengembangan komunitas seni.

3.4 Peluang Ekonomi dan Lapangan Kerja

a. Investasi dan Pengembangan Ekonomi

Menarik investasi dan mendukung pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi.

Contoh: inisiatif pemberian insentif kepada investasi, dan pengembangan pusat industri.

b. Pengembangan SDM dan Keahlian

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan daya saing tenaga kerja. Contoh: program pelatihan vokasional, serta kerjasama dengan institusi pendidikan.

c. Diversifikasi Lapangan Kerja

Mendorong diversifikasi lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Contoh: pengembangan sektor pariwisata, dan promosi industri kreatif.

4. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi yang komprehensif melibatkan berbagai metode, mulai dari interaksi langsung dengan masyarakat hingga pemanfaatan teknologi canggih seperti GIS dan analisis big data.

4.1 Survei Masyarakat dan Stakeholder Terkait

a. Metode Survei

Melakukan survei penduduk untuk menilai persepsi, kebutuhan, dan harapan terkait dengan wilayah. Contoh: kuesioner online, atau wawancara langsung.

b. Partisipasi Aktif Stakeholder

Menggandeng partisipasi aktif dari pemangku kepentingan lokal, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Contoh: workshop partisipatif, dan pertemuan pemangku kepentingan.

4.2 Penggunaan Teknologi untuk Analisis Data

a. Geographic Information System (GIS)

Memanfaatkan teknologi GIS untuk analisis spasial terkait aspek kekuatan dan daya tarik wilayah. Contoh: pemetaan sumber daya alam, dan analisis pola distribusi.

b. Big Data Analytics

Menggunakan analisis big data untuk memahami perilaku masyarakat, tren wisata, dan pola ekonomi. Contoh: analisis data kunjungan pariwisata, serta analisis data ekonomi lokal.

4.3 Kegiatan Observasi Lapangan

a. Observasi Alam dan Lingkungan

Melakukan observasi langsung terhadap keindahan alam dan kondisi lingkungan. Contoh: survei lapangan tentang kondisi alam, observasi flora dan fauna.

b. Interaksi Dengan Komunitas

Terlibat dalam interaksi langsung dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Contoh: diskusi kelompok terfokus, atau pertemuan dengan komunitas lokal.

5. Strategi Pengembangan Berbasis Kekuatan dan Daya Tarik

Strategi pengembangan berbasis kekuatan dan daya tarik membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup branding, pariwisata lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

5.1 Membangun Branding Daerah

a. Pengenalan Brand Daerah

Mengidentifikasi elemen khas dan keunikan daerah untuk dibangun sebagai brand. Contoh: slogan, logo, dan cerita naratif yang memperkuat identitas daerah.

b. Pemasaran Berbasis Cerita (*Storytelling*)

Membangun kampanye pemasaran yang mengandalkan cerita untuk menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat. Contoh: pembuatan video promosi yang menggambarkan keindahan dan keberagaman daerah.

5.2 Pengembangan Pariwisata Lokal

a. Diversifikasi Produk Pariwisata

Menyusun paket pariwisata yang mencakup berbagai pengalaman untuk menarik wisatawan.

Contoh: tur alam, festival budaya, dan kuliner lokal.

b. Infrastruktur Pariwisata

Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pariwisata untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Contoh: pembangunan akomodasi, pengembangan jalur hiking, dan penyediaan fasilitas rekreasi.

5.3 Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendukung Kekuatan Daerah

a. Pelatihan dan Pendidikan

Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan daya saing. Contoh: program pelatihan vokasional dan beasiswa pendidikan.

b. Keterlibatan Komunitas

Membangun keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah. Contoh: pertemuan rutin dengan warga, atau forum partisipatif.

5.4 Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan

a. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan

Memastikan pembangunan infrastruktur berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Contoh: implementasi teknologi hijau dan perencanaan tata kota yang berkelanjutan.

b. Peningkatan Konektivitas

Meningkatkan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan konektivitas transportasi.

Contoh: pengembangan jaringan transportasi umum atau peningkatan jalan raya.

Penutup

Identifikasi kekuatan dan daya tarik daerah merupakan langkah krusial dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan memahami potensi unik suatu wilayah, kita dapat merancang strategi pengembangan yang memaksimalkan keunggulan komparatif dan meningkatkan daya tarik wilayah tersebut. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pengembangan berbasis kekuatan dan daya tarik melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Membangun

branding daerah, mengembangkan sektor pariwisata lokal, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan adalah elemen-elemen kunci dalam mencapai tujuan pengembangan wilayah yang berhasil. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi implementasi strategi ini, serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan juga menjadi kunci kesuksesan. Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan suatu daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemeliharaan lingkungan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, langkah-langkah strategis diperlukan untuk menjadi landasan dalam menciptakan daerah yang dinamis, inklusif, dan berkualitas.

SUB MODUL 3: Meet dan Match dengan potensial penanam modal asing

Deskripsi: Sub modul ini membahas mengenai bagaimana proses pertemuan dan kolaborasi dilakukan antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses penanaman modal asing maupun perdagangan internasional. Selain itu, juga diidentifikasi berbagai macam bentuk kerjasama termasuk *Global Production Network* serta potensi yang dapat dikembangkan daerah untuk mendorong penanaman modal asing di daerah.

Tujuan: Peserta memahami bentuk-bentuk kerjasama dan potensi penanaman modal asing di daerah

Waktu: 90 menit

Media/alat bantu: Materi presentasi, flip chart

Metode: Penyampaian materi, Diskusi, Curah Pendapat

Proses:

1. Fasilitator memaparkan bentuk-bentuk kerjasama dan potensi pengembangan daerah melalui investor asing.
2. Fasilitator meminta peserta mengidentifikasi beberapa contoh terkait mencari pola kerjasama yang sudah dijalankan dan kendala yang terjadi.
3. Diskusi antara fasilitator dan peserta termasuk identifikasi hal-hal yang dapat dikembangkan untuk menarik investor dan mengembangkan potensi penanam modal asing.

Materi

Kata 'kolaborasi' menjadi kunci dalam paradiplomasi, dimana kerja-sama antar daerah menjadi sebuah keharusan untuk mencapai kepentingan bersama.

Pada era globalisasi, *Collaboration* (kerjasama atau kolaborasi berbagai elemen) dalam berdiplomasi kepada semua elemen ditujukan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan sesuatu untuk menutup kelemahan masing-masing daerah. Kolaborasi antar daerah dapat dijelaskan melalui paham ‘regionalisasi’, dimana tren kolaborasi yang terus mengalami kenaikan baik dilini G2G, B2G, hingga B2B, yang mendorong *World Trade Organisation* (WTO) dalam memperjelas aturan mengenai negosiasi dagang dan *preferential trade agreements*.

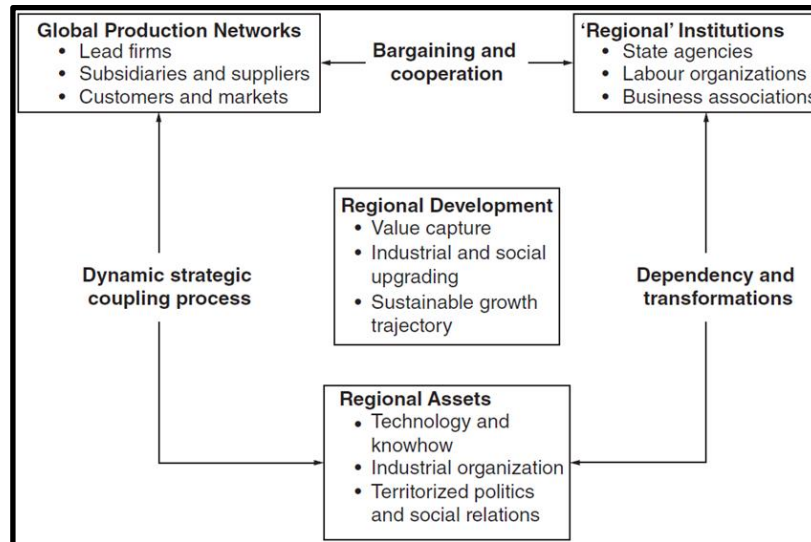
Poin-poin pada Sub A.3. *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015* mengenai *free flow of Investment* menjelaskan pentingnya alur investasi yang bersifat kompetitif, bebas, terbuka, dan memberlakukan aktor investor sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, integrasi antar daerah (regional) dapat tercapai sehingga kepercayaan investor akan semakin tinggi terhadap kawasan yang bersangkutan. Nilai yang disematkan dapat menjelaskan bagaimana kerja sama antar region untuk menarik investor melalui fasilitas dan kooperasi. Beberapa hal yang dapat ditekankan mengenai *facilitation and cooperation* pada *Roadmap for an ASEAN Community 2009-2015* adalah sebagai berikut:

- a. Harmonisasi, untuk integrasi industri dan ekonomi.
- b. Penyederhanaan prosedur untuk persetujuan investasi.
- c. Penyebaran informasi meliputi peraturan, regulasi, hingga kebijakan.
- d. Penguatan database.
- e. Memperkuat koordinasi & konsultasi.

Tujuan yang telah disampaikan dari roadmap ASEAN berfokus dalam menciptakan suasana investasi yang mengintegrasikan antara area yang ingin diinvestasikan serta *production network*. Baik dari penjelasan WTO hingga roadmap ASEAN, poin ‘*mix and match*’ secara tidak langsung menjabarkan bagaimana potensi investasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.

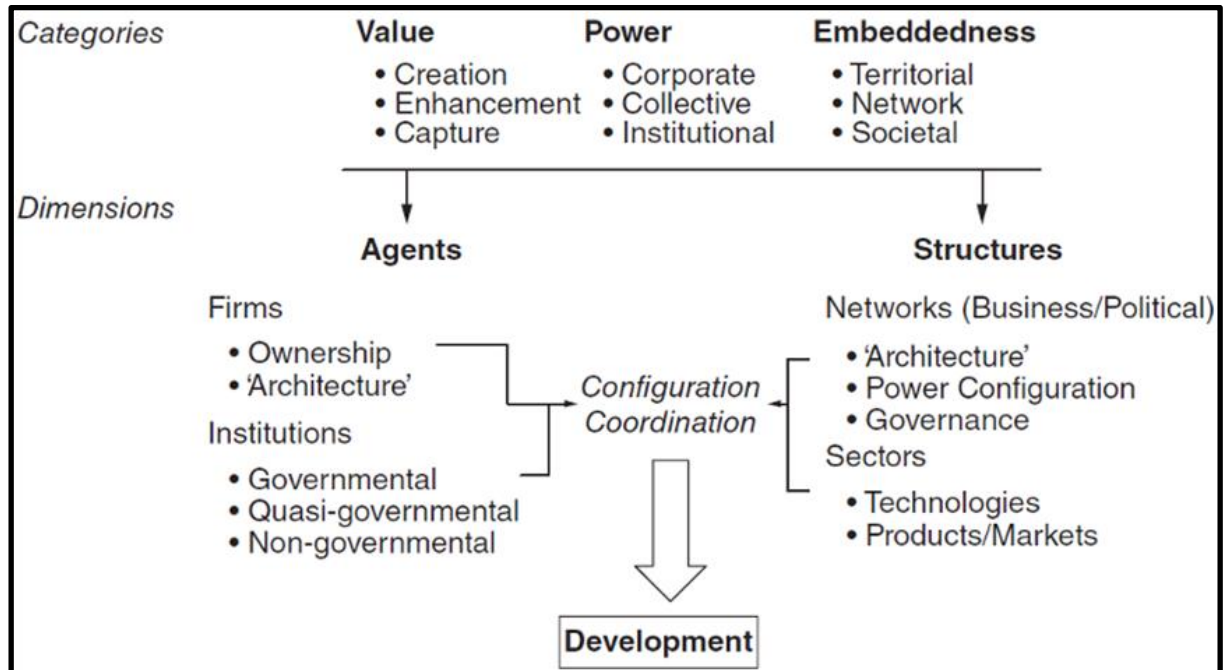
'*Mix and Match*' merupakan bagian dari berdiplomasi, sehingga manajemen *stakeholders*, *bargaining corporations*, hingga *Global Production Network (GPN)* sangat dibutuhkan dan harus saling terkoneksi. Semua bagian yang telah disampaikan berdampak kepada transformasi serta eksistensi aktor daerah, yang membutuhkan kerja sama antara pemerintahan, perusahaan lokal dan nonlokal, serta *civil society* agar pembangunan dapat berlangsung.

Global Production Network (GPN) secara umum merupakan hasil gabungan kontestasi serta kolaborasi dari berbagai aktor, termasuk perusahaan, *Non-governmental organizations (NGOs)*, asosiasi perusahaan, dan agensi lokal maupun internasional, yang masing-masing aktor memiliki agenda dan kepentingan tersendiri (Levy, 2008). Lebih lanjut, GPN tidak hanya sekedar arena kompetisi pasar, melainkan sebuah sistem politik-ekonomi yang kompleks mengenai relasi produksi, konsumsi, dan distribusi yang saling terkait, yang dikonstruksikan untuk kebutuhan sosio-politik masyarakat. Penjelasan mengenai '*Mix and Match*' juga bisa dideskripsikan melalui paham *Global Commodity Chain (GCC)*, dimana koneksi antar aktor dikelompokkan pada satu komoditas atau produk, yang memungkinkan perusahaan maupun aktor pemerintahan untuk berinteraksi dengan aktor lainnya (Gereffi, 1994). Fokus utama dari GPN menurut Gramsci adalah "konektivitas" antar aktor terkait, sehingga muncul fragmentasi antara aktor untuk menumbuhkan kegiatan produksinya, sehingga hasil dari kegiatan produksi dapat menciptakan pasar baru. Melalui hasil tersebut, progres dan kompetisi dalam pasar menjadi fokus dan tujuan dari munculnya paham GPN.



Gambar 3.1. Teori Bargaining and Cooperation

GPN dapat dikategorikan menjadi tiga bagian utama, yakni nilai, *power*/kekuatan, dan keterikatan. Nilai menurut Gramsci melibatkan aktivitas ekonomi, yang merupakan bagian dari proses serta tenaga kerja yang dikenal juga *value creation*. Dalam rantai proses produksi yang melibatkan tenaga kerja, nilai ditunjukkan sebagai konteks penting dalam aktivitas perekonomian. Kemudian diperlukan peningkatan nilai dalam percepatan pengetahuan dan penciptaan teknologi jika nilai yang diterapkan saat ini masih terbatas. Pada akhirnya, pengambilan nilai dapat dicapai melalui kombinasi inovasi dan pengembangan. (Gereffi, 1994).



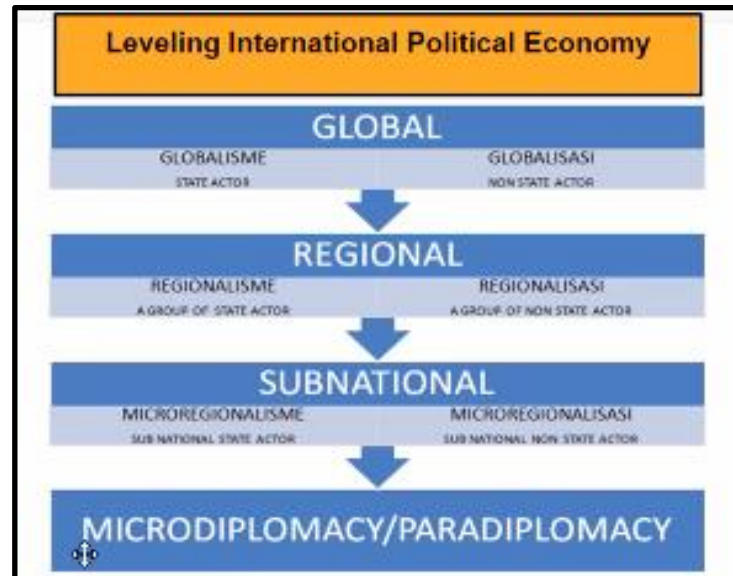
Gambar 3.2. Nilai-nilai dalam GPN

Bermula dari nilai sebagai elemen utama dalam GPN, *power* datang bersamaan. *Power* adalah kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain untuk memenuhi kepentingannya. Dengan membangun hubungan yang simetris, pengakuan kelembagaan yang paralel, dan tingkat yang lebih tinggi, kekuasaan diterjemahkan ke dalam tindakan perusahaan secara kolektif. Ketergantungan sangat tinggi karena kekuasaan relatif. Jadi, menurut Gramsci, setiap negara perifer atau semi-pinggiran berusaha semaksimal mungkin untuk diakui sebagai negara inti (Levy, 2008).

Terakhir, klasifikasi keterkaitan nilai dan kekuasaan dikaitkan dengan hasil bagi masyarakat, jaringan, dan teritorial dalam kategori ini (Henderson et al., 2002). Ketiga temuan ini membawa fitur dan relevansi. Misalnya, perusahaan di

bidang sosial melakukan ekspansi ke luar negeri dengan membawa ciri-ciri budaya mereka sendiri (seperti yang dilakukan Indofood pada produk Indomie, yang menjualnya ke Eropa dengan rasa atau bumbu rendang, yang merupakan bumbu asli Indonesia). Selanjutnya dimasukkan ke dalam jaringan, di mana mereka bekerja sama dengan agen ekstra-perusahaan, yang terdiri dari entitas pemerintah dan nonpemerintah. Mereka melakukan fungsi bersama. Kemudian diakhiri dengan keterikatan teritorial, yang biasanya membahas bisnis dan pemasok utama di daerah tersebut dalam hal kebijakan, tenaga kerja, dan produksi.

Paham mengenai '*Mix and Match*' memerlukan pemisahan dan penyebaran aktivitas ekonomi. Dalam konteks penyebaran, diperlukannya koordinasi dan integrasi yang kuat antar rantai pasok, yang memerlukan penanaman modal asing (FDI), akses menuju pasar internasional, serta memanfaatkan organisasi, institusi, dan kapasitas perusahaan multinasional (Caves, 2007; Ruigrok & van Tulder, 2013). Oleh karena itu, koordinasi dan integrasi yang terdapat dalam GPN sejalan dengan program pemerintah, dikarenakan sistem GPN yang tunduk dan dapat diimplementasikan pada segala tingkat dan level pemerintahan. Pada akhirnya, peraturan nasional serta perjanjian internasional juga harus membahas mengenai koordinasi rantai pasokan dan penetapan regulasi pihak swasta mengenai standar ketenagakerjaan dan lingkungan (Gereffi et al., 2005; Hart & Prakash, 2003; Levy & Newell, 2004).



Gambar 3.3. Level-level dalam Politik Ekonomi Internasional

Pada bisnis internasional, Gramsci menilai teori *FDI Bargaining* juga menghasilkan nilai profit antara MNC dan daerah terlibat dalam aspek distribusi. Mengenai dampak distribusi, hal tersebut kemudian berimbas pada asumsi bahwa negara bertindak untuk kepentingan publik, mengabaikan perpecahan antar golongan, serta potensi aliansi antar aktor (Levy, 2008). GPN memungkinkan perusahaan atau aktor pemerintahan untuk menggunakan hak politiknya, dalam hal ini untuk proses tawar-menawar dan kerja sama. GPN juga mendorong peran dari aktor regional untuk masuk dan terlibat ke dalam jaringan diplomatik.

Pada akhirnya, perspektif GPN tentang dampak pembangunan harus memasukkan daerah sub-nasional yang mampu beroperasi dalam kondisi industri pasar. Ini karena pertumbuhan berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi melalui partisipasi pihak luar, keuntungan bersama dapat dicapai. Pada tabel pertama menunjukkan bagaimana penghubung strategis

diterapkan dengan menggunakan lembaga dan aset regional. Tujuan dari proses gabungan strategis masih adalah untuk menghasilkan nilai bagi kedua belah pihak, perusahaan regional dan perusahaan utama. Bagaimana penggunaan lembaga regional dan aset regional (sumber, sosial, dan teknologi) dapat disesuaikan dengan GPN untuk mencapai dampak pembangunan adalah topik utama. Proses gabungan ini tidak selalu berhasil; konstruksi kerja sama yang menentukan. Struktur atau tingkat kesesuaian juga dipengaruhi oleh apakah aset di wilayah ini memenuhi persyaratan GPN.

SUB MODUL 4: Negosiasi bisnis internasional di daerah

Deskripsi: Proses negosiasi bisnis dengan investor asing atau stakeholder ekonomi perlu dipahami untuk dapat memahami kepentingan dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan dari investasi yang masuk ke daerah. Masing-masing aktor yang melakukan investasi juga mempunyai kepentingan untuk mengembangkan bisnisnya, dimana hal ini dapat dipahami melalui proses negosiasi dan dialog.

Tujuan: Peserta memahami konsep dan model negosiasi bisnis yang dijalankan untuk mengembangkan investasi dan perdagangan internasional.

Waktu: 90 menit

Media/alat bantu: Flip Chart, Kertas plano

Metode: Role play (bermain peran), Diskusi

Proses:

1. Peserta dibagi kedalam dua kelompok besar, kelompok investor dan negosiator pemerintah. Fasilitator membagikan lembar permainan peran tentang negosiasi. Mereka kemudian dimintakan untuk membaca lembar karakter dan tugas kelompok selama 15 menit.
2. Setelah selesai, kedua kelompok digabung. Peserta kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari dua atau empat orang (tergantung jumlah peserta). Dua atau empat orang tersebut harus berasal dari kelompok yang berbeda bermain peran, dalam bentuk bertemu, bersmap dan bernegosiasi.
3. Fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain:
 - a. Berapa banyak kelompok yang berhasil menandatangani kesepakatan?
 - b. Berapa yang tidak berhasil?

- c. Mengapa berhasil? Mengapa tidak berhasil
 - d. Bagaimana perasaan mereka selama proses negosiasi?
 - e. Hal-hal apa saja yang terjadi dan mengapa?
 - f. Apa yang bisa kita pelajari dari proses ini?
4. Peserta mempresentasikan hasil kerja kelompok
 5. Fasilitator menjelaskan bahwa keberhasilan dan ketidakberhasilan proses negosiasi
 6. Fasilitator menutup sesi dengan melakukan review ulang yang bisa menjadi proses pembelajaran.

Materi

Salah satu prinsip dasar perdagangan internasional adalah bahwa orang harus membeli barang dan jasa dari negara yang memiliki harga terendah dan menjualnya ke negara yang memiliki harga tertinggi. Oleh sebab itu, perdagangan dan investasi internasional perlu dipahami terkait mengapa dan bagaimana berbagai negara dan aktor ekonomi melakukan perdagangan satu sama lain. Hal ini melihat beberapa indikasi utama seperti berapa biaya pengiriman barang antar tempat, pajak atas barang impor, dan hal-hal lain yang mempengaruhi barang apa saja yang bisa dibuat dan dijual dengan baik di setiap tempat. Hal ini bermanfaat bagi pihak yang membeli dan menjual barang, dan bagaimana negara-negara dapat memiliki peluang untuk mempercepat kemajuan ekonomi mereka.

Negosiasi bisnis internasional yang dijalankan oleh daerah merupakan kegiatan negosiasi bisnis yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai negara di wilayah yang sama untuk membahas mengenai bisnis maupun ekonomi. Untuk meningkatkan pendapatan negara, perlu yang dilakukan perdagangan internasional dan juga investasi. (TERZEA, 2016). Secara konsep, kegiatan

perdagangan internasional dibagi menjadi tiga kategori yang dibagi menjadi sebagai berikut.

1. Operasi perdagangan internasional: kegiatan yang dilakukan oleh para pebisnis untuk menjual dan membeli barang dari negara lain. Hal ini mencakup aktivitas seperti mengekspor dan mengimpor barang, serta mengirimkan barang melalui negara lain untuk sampai ke tujuan akhir.
2. Aliansi strategis. Ini adalah saat orang-orang dari berbagai negara bekerja sama dan berbagi ide dan teknologi untuk saling membantu. Ini seperti sebuah tim di mana setiap orang membawa sesuatu yang berbeda dan bekerja sama untuk membuat segalanya menjadi lebih baik.
3. Penanaman modal asing: secara langsung merupakan cara suatu perusahaan untuk masuk ke negara lain dan mempunyai kendali atas barang miliknya di sana.

Dengan melakukan tiga hal diatas maka dapat dipastikan mampu meningkatkan sumber pendapatan ekonomi negara bila tidak mengalami kerugian. Dalam proses pembangunan ekonomi, perlu diawali dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan langkah awal ini maka akan menciptakan lapangan pekerjaan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu memainkan peran dalam bisnis internasional juga dengan melibatkan potensial dari berbagai daerah. Setiap daerah memiliki keunggulannya tersendiri, misalnya di Natuna kaya akan minyak dan gas. Mungkin saja pemerintah dapat menggencarkan projek bisnis terkait dengan penanaman modal asing di daerah sana.

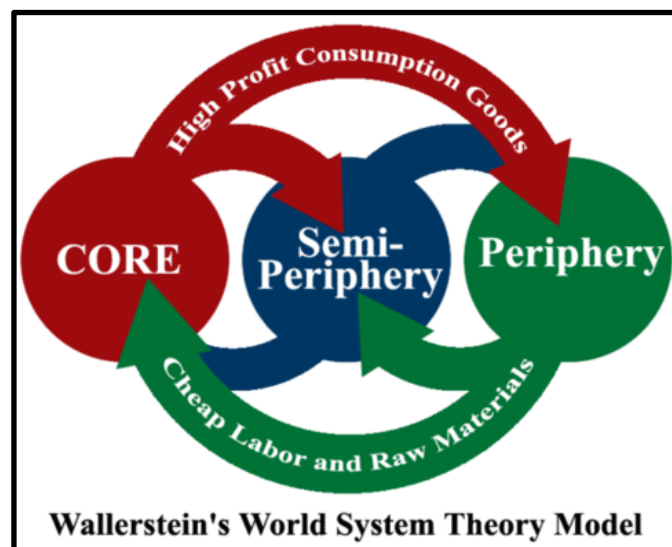
Salah satu model dari perdagangan internasional adalah *Ricardian Model* yang menegaskan pada prinsip keunggulan komparatif. Dalam model Ricardian,

dunia terdiri dari dua negara yang memproduksi dua jenis barang, dengan tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi (Golub & Hsieh, 2000). Model ini menunjukkan bahwa jika setiap negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, meskipun negara tersebut kurang efisien (memiliki kerugian absolut) dalam memproduksi kedua barang tersebut, masih ada keuntungan perdagangan. Kaitan antara *Ricardian Model* dengan situasi di era sekarang adalah heterogenitas produksi produk yang berbeda di tiap kawasan atau daerah di suatu negara. Dengan keberagaman produksi ini, maka akan menghasilkan keragaman sumber pendapatan di sektor tertentu bagi negara.

Pandangan lain dari ekonom yang berpendapat bahwa globalisasi dan investasi dan perdagangan internasional memberikan pengaruh yang baik mengatakan bahwa dimudahkannya dengan teknologi untuk memproduksi ataupun menghasilkan produk (Vijayasri, 2013). Sesuai dengan pandangan marxisme yang mengatakan bahwa terdapat teori sistem dunia yang diklasifikasi menjadi negara inti, negara semi periferi (berkembang) dan negara periferi. Semuanya ini saling berinteraksi satu sama lain dan saling membutuhkan. Negara inti merupakan negara maju yang membutuhkan bahan mentah dari negara semi periferi dan periferi yang kemudian akan diolah menjadi barang jadi dan dijual kembali ke negara berkembang. Sebaliknya negara berkembang membutuhkan negara maju sebagai aktor yang memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi yang kemudian akan digunakan (Petras, 1981).

Beberapa pengaruh positif dari perdagangan internasional dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah dapat meningkatkan daya saing. Berkat adanya integrasi dari perekonomian dunia, para investor dan pengusaha dapat memberikan akses yang mudah terhadap inovasi teknologi (Vijayasri, 2013).

Dengan adanya inovasi teknologi maka produktivitas akan meningkat. Namun di era digital sangat bergantung pada globalisasi. Dua pandangan dari ekonom yang terpisah mengatakan bahwa perdagangan internasional memberikan perubahan yang tidak menguntungkan bagi perekonomian dan keuangan di negara-negara berkembang. Menurutnya keuntungan semuanya diraup dan dinikmati oleh negara maju di dunia. Melalui liberalisasi kebijakan perdagangan, globalisasi dan pengurangan tarif mengakibatkan tatanan industri di negara berkembang menjadi buruk.



Gambar 4.1 Teori Sistem Dunia

SUB MODUL 5: Perencanaan dan Pelaksanaan investasi di daerah dan perdagangan internasional

Deskripsi: Sub Modul ini mendiskusikan perencanaan dan pelaksanaan investasi di daerah terutama terkait sektor perdagangan internasional yang akan dijalankan oleh daerah. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pihak swasta perlu dipahami agar proses yang dijalankan sejalan dengan proses perencanaan daerah, terutama untuk dapat mengimplementasikan investasi asing yang sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Tujuan: Peserta memahami konsep dan model pengembangan investasi dan perdagangan internasional

Waktu: 90 menit

Media/alat bantu: Flip Chart, Kertas plano

Metode: Diskusi, Curah Pendapat

Proses:

1. Fasilitator meminta peserta menuliskan dalam kelompok kira-kira rencana dan bentuk pelaksanaan dari investasi dan perdagangan internasional di daerah dalam kelompok.
2. Masing-masing kelompok mempresentasikan rencana dan tindak lanjut investasi dan perdagangan internasional yang telah disusun.
3. Peserta menanggapi hasil perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan oleh kelompok
4. Fasilitator memberikan masukan lebih lanjut dari hasil persentase masing-masing kelompok.
5. Fasilitator menutup sesi dengan review dan identifikasi hal-hal yang dapat diimplementasikan di daerah masing-masing.

Materi

Untuk meningkatkan pemahaman tentang perencanaan dan pelaksanaan investasi asing di daerah-daerah Indonesia, maka para pelaku khususnya dinas investasi dan perdagangan perlu menggali potensi investasi asing di daerah-daerah Indonesia, dan mendorong kerja sama antara pemerintah, investor asing, dan pelaku usaha lokal yang bisa menjual produknya ke pasar internasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa investasi asing merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Investasi asing dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan transfer teknologi. Pemerintah Indonesia telah menargetkan peningkatan investasi asing sebesar 10% pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu meningkatkan upaya perencanaan dan pelaksanaan investasi asing di daerah-daerah Indonesia.

Perencanaan Investasi Asing

Perencanaan investasi asing merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan investasi asing di daerah-daerah Indonesia. Perencanaan investasi asing harus dilakukan secara cermat dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah atau seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam perencanaan investasi asing, perlu dikaji potensi investasi asing di daerah tersebut. Potensi investasi asing dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, perlu juga dikaji kebutuhan investor asing. Kebutuhan investor asing dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti lokasi, fasilitas, dan insentif.

Pelaksanaan Investasi Asing

Pelaksanaan investasi asing merupakan langkah selanjutnya setelah perencanaan investasi asing. Pelaksanaan investasi asing harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan investasi asing, perlu dilakukan berbagai upaya, seperti:

1. Penyediaan informasi dan fasilitas bagi investor asing
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha lokal
3. Penyelesaian hambatan investasi
4. Potensi Investasi Asing di Daerah-daerah Indonesia

Indonesia memiliki potensi investasi asing yang besar di berbagai bidang, seperti: industri manufaktur, pertanian, pertambangan, pariwisata, dan teknologi informasi. Potensi investasi asing di daerah-daerah Indonesia dapat dilihat dari berbagai faktor, seperti: sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang besar dan produktif, letak geografis yang strategis, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, kerja Sama Pemerintah, investor asing, dan pelaku usaha lokal.

Kerja sama antara pemerintah, investor asing, dan pelaku usaha lokal merupakan kunci keberhasilan investasi asing di daerah-daerah Indonesia. Pemerintah perlu memberikan dukungan kepada investor asing, baik dari segi kebijakan maupun fasilitas. Investor asing perlu bermitra dengan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan nilai tambah investasi serta untuk meningkatkan pertumbuhan dan kapasitas pengusaha lokal.

Pelaksanaan Perdagangan Internasional

Pelaksanaan perdagangan internasional di Indonesia melibatkan serangkaian kebijakan, regulasi, dan praktek bisnis yang dirancang untuk memfasilitasi arus barang dan jasa lintas batas. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perdagangan internasional di Indonesia:

Kebijakan Pemerintah:

- Pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional. Perencanaan dan kebijakan perdagangan luar negeri, tarif, dan regulasi lainnya ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait lainnya termasuk Pemerintah Daerah.

Perjanjian Perdagangan:

- Indonesia terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional, baik di tingkat regional maupun multilateral. Sebagai contoh, Indonesia merupakan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan memiliki perjanjian perdagangan dengan berbagai negara dan blok ekonomi, seperti ASEAN, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, dan lainnya.

Infrastruktur dan Logistik:

- Ketersediaan infrastruktur yang baik, seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi memainkan peran kunci dalam kelancaran perdagangan internasional. Peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang dan mengurangi pembiayaan logistik perdagangan.

Tarif dan Bea Cukai:

- Tarif impor dan ekspor, serta aturan bea cukai dapat mempengaruhi biaya dan proses perdagangan. Namun, kebijakan tarif dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan.

Prosedur Perizinan dan Administrasi:

- Prosedur perizinan dan administrasi untuk ekspor dan impor dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi perdagangan. Pemerintah perlu terus berupaya untuk menyederhanakan prosedur ini.

Promosi Ekspor:

- Pemerintah mendukung upaya promosi ekspor melalui program-program seperti peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar internasional dan berpartisipasi dalam pameran dagang dan promosi perdagangan yang lebih terintegrasi.

Kondisi Ekonomi Global:

- Kondisi ekonomi global, fluktuasi mata uang, dan perkembangan ekonomi di negara mitra dagang juga mempengaruhi proses investasi dan perdagangan internasional yang masuk ke Indonesia.

Kesiapan Bisnis:

- Kesiapan perusahaan dan pengusaha lokal serta pengusaha asing untuk memahami dan mematuhi regulasi perdagangan internasional, serta kemampuan untuk bersaing di pasar global, juga merupakan faktor penting.

Penting untuk dicatat bahwa kondisi dan kebijakan perdagangan internasional dapat berubah dari waktu ke waktu, yang dapat mempengaruhi

kebijakan perdagangan nasional. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan pemerintah perlu terus memantau perubahan tersebut dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan perdagangan global.

Pemerintah, investor asing, dan pelaku usaha lokal perlu bekerja sama untuk meningkatkan investasi asing di daerah-daerah di Indonesia. Kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti: fasilitasi pertemuan antara investor asing dan pelaku usaha lokal, penyediaan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Dengan kerja sama yang erat, maka investasi asing di daerah-daerah Indonesia dapat meningkat dan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

REFERENSI

- Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. Free Press.
- Agosin, M. R., & Machado, R. (2005). Foreign investment in developing countries: does it crowd in domestic investment?. *Oxford Development Studies*, 33(2), 149-162.
- Annur, C. M. (2023). Serapan Tenaga Kerja RI Merosot di Tengah Melonjaknya Investasi Asing. Retrieved from:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/01/25/serapan-tenaga-kerja-ri-merosot-di-tengah-melonjaknya-investasi-asing>
- Caves, R. E. (2007). *Multinational Enterprise and Economic Analysis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511619113>
- Chen, J. (2022, July 15). *International Bond: Meaning and examples*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/i/international-investing.asp#:~:text=International%20investing%20means%20holding%20securities,returns%20and%20reduce%20portfolio%20risk.>
- Gereffi, G. (1994). The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks. In M. Korzeniewicz (Ed.), *Global Value Chains and Development* (pp. 43–71). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108559423.003>
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The governance of global value chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Golub, S. S., & Hsieh, C. -T. (2000). Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited. *Review of International Economics*.
- Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: Implications for strategy formulation. *California Management Review*, 33(3), 114-135.
- Hart, J. A., & Prakash, A. (2003). *Globalization and Governance* (J. A. Hart & A. Prakash, Eds.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203478790>
- Henderson, J., Dicken, P., Hess, M., Coe, N., & Yeung, H. W.-C. (2002). Global production networks and the analysis of economic development. *Review*

of *International Political Economy*, 9(3), 436–464.
<https://doi.org/10.1080/09692290210150842>

Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: It's time for a product recall. *Long Range Planning*, 30(1), 46-52.

IMF (2022). *What is the IMF?*. Retrieved from International Monetary Fund
<https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-at-a-Glance>

Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. (1993). *Marketing places: attracting investment, industry, and tourism to cities, states, and nations*. Simon and Schuster.

Levy, D. L. (2008). Political Contestation in Global Production Networks. *Academy of Management Review*, 33(4), 943–963.
<https://doi.org/10.5465/amr.2008.34422006>

Levy, D. L., & Newell, P. J. (2004). *The Business of Global Environmental Governance* (D. L. Levy & P. J. Newell, Eds.). The MIT Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/1705.001.0001>

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Science and Systems*. John Wiley & Sons.

Malecki, E. J. (2018). Connecting local economies to global innovation networks: Open innovation, clusters, and global value chains. *Regional Studies*, 52(3), 361-371.

OECD. (2023). *Who we are*. Retrieved from OECD: <https://www.oecd.org/about/>

Petras, J. (1981). Dependency and World System Theory: a Critique and New Directions. *Latin American Perspective*, 3-4.

Pike, S. (2004). Destination image analysis—a review of 142 papers from 1973 to 2000. *Tourism Management*, 25(6), 709-722.

Porter, M. E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. *Harvard Business Review*, 86(1), 78-93.

Ravenhill, J. (2017). *Global Political Economy*. Oxford University Press.

Rosadi, D. (2020). *Regulasi Berbasis Keberlanjutan, Kunci Menarik Investasi ke Daerah*. Retrieved from:

<https://katadata.co.id/doddyrosadi/berita/5f917477a8bed/regulasi-berbasis-keberlanjutan-kunci-menarik-investasi-ke-daerah>

Rose, A. K. (2005). Which international institutions promote international trade? *Review of International Economics*, 13(4), 682–698.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9396.2005.00531.x>

Ruigrok, W., & van Tulder, R. (2013). *The Logic of International Restructuring*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315004198>

Rutherford, M. (2004). Case studies from the regions: Assessing the economic impact of clusters. *Regional Studies*, 38(9), 961-966.

Strange, S. (1994). *States and Markets*. Continuum.

Team, C. (2023). *International trade*. Corporate Finance Institute.
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/international-trade/#>

Team, C. (2023). *Foreign Direct Investment (FDI)*. Corporate Finance Institute.
<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/foreign-direct-investment-fdi/>

TERZEA, E. R. (2016). The Concept of International Trade and Main Classical Theories. *Practical Application of Science*.

Vijayasri, G. V. (2013). The importance of international trade in the world. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*, 2(9), 111-119.

Wehrich, H. (1982). The TOWS matrix—a tool for situational analysis. *Long Range Planning*, 15 (2), 54-66.

WTO. (2023). *What is the WTO?* Retrieved from WORLD TRADE ORGANIZATION :
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm

Vijayasri, G. V. (2013). THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL TRADE IN THE WORLD. *International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research*.

UNWTO. (2018). *Tourism and Culture Synergies*. World Tourism Organization.